

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA D.I. YOGYAKARTA

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta Tahun 2006-2015)

Adityas Wahyuningsih
Adityaswahyuningsih@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether there is influence of Local Original Income, General Allocation Funds, and Special Allocation Fund of the Capital Expenditure Allocation in Regency/City of D.I. Yogyakarta either simultaneously or partial. The research using descriptive methods. The population in this study is a Regency/City of D.I. Yogyakarta consists of 4 Regencies and 1 city in 2006-2015. This study uses secondary data in the form of budget realization report in Regency/City of D.I. Yogyakarta in 2006-2015. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression t-test, F-test, and the coefficient of determination. The data collected was analyzed first by testing the assumptions of classical hypothesis testing and then performed testing tool SPSS 15.0. Based on the results of this study concluded that in partial General Allocation Funds has no effect on capital expenditures allocation, while Special Allocation Funds and Local Original Income significant positive effect on capital expenditures allocation. Simultaneously variable Local Original Income, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds significant effect on capital expenditures allocation. Advice can be given in this research is to see the phenomenon that General Allocation Funds is no effect on capital expenditures allocation, local governments should pay more attention to the proportion of General Allocation Funds is allocated to capital expenditure budget.

Keyword: *Local Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Capital Expenditure Allocation*

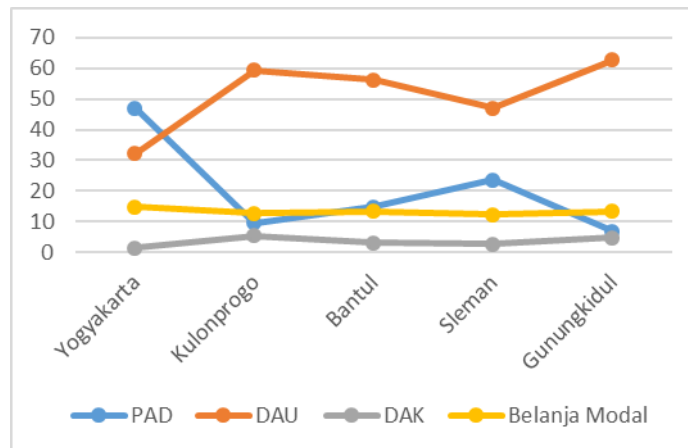
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan tentang otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Seperti halnya yang tertuang dalam Al-Qur'an QS. Al-Anbiya (21):73 yang berisi tentang tingkatan ideal sosok seorang pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan. Berdasarkan ayat tersebut pemerintah diharapkan untuk tidak melakukan kezaliman dalam hal keilmuan, tindakan, dan pengambilan keputusan.

Pelaksanaan otonomi daerah dipandang sebagai suatu kewajiban dalam menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal sehingga diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Namun disisi lain, anggaran menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengalokasian anggaran, merupakan masalah yang paling banyak dihadapi oleh Pemerintah Daerah di dalam organisasi sektor publik. Pendapatan daerah yang tinggi, yaitu PAD, DAU, dan DAK harus diimbangi dengan tingginya Belanja Modal. Namun di dalam praktiknya, masih belum terlaksana dengan baik dalam pengalokasian belanja modal tersebut.



Gambar: 1.1
Perbandingan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal tahun anggaran 2013
(dalam persentase)

Sumber: Laporan realisasi anggaran tahun 2013

Jumlah PAD di Kota Yogyakarta paling tinggi yaitu sebesar 47,8% dibandingkan kabupaten yang lain. Namun, hal itu tidak diikuti dengan tingginya jumlah belanja modal yaitu sebesar 14,72%. Hal yang sama juga terlihat pada kabupaten Bantul dan Sleman. Jumlah DAU Kabupaten Gunungkidul lebih tinggi dibandingkan Kota Yogyakarta yaitu sebesar 62,72% tetapi belanja modal yang dikeluarkan di kota Yogyakarta lebih besar daripada Kabupaten Gunungkidul. Jumlah DAK di kota Kulonprogo sebesar 5,27% lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang lain tetapi hal itu tidak diikuti dengan tingginya jumlah belanja modal. Jumlah belanja modal paling tinggi dikeluarkan oleh kota Yogyakarta yang jumlah DAK lebih kecil yaitu sebesar 14,72%.

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran daerah dengan baik. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang kemudian menciptakan

kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki daerah dan memberikan proposi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan sektor-sektor produktif di daerah.

Dari Penelitian-penelitian terdahulu, Nuarisa (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Nobianto dan Hanafiah (2015) menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, dan Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sharma (2012) menyatakan bahwa Pemerintah harus memastikan bahwa belanja modal dan pengeluaran berulang dikelola dengan baik dengan cara bahwa itu akan meningkatkan kapasitas produksi bangsa dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Faridi (2011) menyatakan bahwa hasil studi empiris menunjukkan bahwa pemerintah tingkat provinsi dan daerah harus diberikan otonomi yang lebih dan otoritas dalam masalah fiskal. Mengacu pada berbagai hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka secara ringkas masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta?

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta?
4. Apakah Pendapartan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta?

Teori Desentralisasi

Teori Desentralisasi menurut Soenobo Wirjosoegito (2004), memberikan definisi sebagai berikut: “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari itu”.

Belanja Modal

Menurut Abdul Halim (2008): “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Penggolongan belanja modal dibagi menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal

peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal fisik lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di dalam setiap tahunnya sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengaruh PAD terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Penerimaan daerah akan mempengaruhi anggaran belanja. Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber keuangan lokal secara efektif dan optimal, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin tinggi yang akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah. Sehingga jika PAD meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan

suatu pengeluaran belanja modal juga akan mengalami peningkatan. Sugiardi dan Supadmi (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011. Berdasarkan uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal

Pengaruh DAU terhadap Pengalokasian Belanja Modal

DAU merupakan transfer sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di dalam setiap tahunnya sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan. Dalam jangka panjang, dana transfer/perimbangan akan mempengaruhi belanja modal dan berkurangnya jumlah dana transfer/perimbangan bisa mengakibatkan menurunnya pengeluaran belanja modal. Hal ini berarti bahwa belanja daerah termasuk di dalamnya belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum. Nuarisa (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal

Pengaruh DAK terhadap Pengalokasian Belanja Modal

DAK adalah alokasi dari APBN kepada provinsi, kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam jangka panjang, dana transfer/perimbangan akan memengaruhi belanja modal dan berkurangnya jumlah dana transfer/perimbangan bisa mengakibatkan menurunnya pengeluaran belanja modal. Hal ini berarti bahwa belanja daerah termasuk di dalamnya belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus. Nuarisa (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal

Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Menurut Sidik (2002), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah

harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara yaitu dengan transfer DAU dan DAK. Nobianto dan Hanafiah (2015) menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, dan Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal

METODE PENELITIAN

Obyek yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pada Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota tahun 2006-2015. Jenis data yang digunakan adalah berupa data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Belanja Modal yang diakses melalui situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui internet dan Biro Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka (Sukmadinata, 2006:5). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dengan periode waktu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Uji Normallitas

Tabel: 4.2
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	,090	50	,200(*)	,979	50	,525

* This is a lower bound of the true significance.

^a Lilliefors Significance Correction

Sumber : Output SPSS

Dari hasil test of normality diketahui nilai statistik 0,090 atau nilai sig 0,200 atau 20% lebih besar dari nilai α 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel: 4.3
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,664	2,930		3,981	,000		
	LnPAD	,360	,080	,608	4,484	,000	,751	1,331
	LnDAU	,039	,062	,079	,628	,533	,868	1,152
	LnDAK	,150	,064	,301	2,356	,023	,846	1,181

a. Dependent Variable: LnBM

Hasil Uji Multikolonieritas setelah Ln pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu LnPAD, LnDAU, dan LnDAK mempunyai angka VIF < 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 10% ($\alpha = 0,10$). Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk variabel di atas tidak terdapat persoalan multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel: 4.4
Uji Autokorelasi *Runs Test*

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value(a)	,00185
Cases < Test Value	25
Cases >= Test Value	25
Total Cases	50
Number of Runs	26
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

^a Median

Sumber : Output SPSS

Bila α yang ditentukan adalah 5%, maka hasil *run test* lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah otokorelasi pada data yang diuji. Berdasarkan hasil *runs test* pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > α 0,05 yang berarti hipotesis nol gagal ditolak. Dengan demikian data yang digunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel: 4.5
Hasil Uji *Glesjer* Setelah Ln
Coefficients^(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	,898	1,880		,478	,635
	LnPAD	,009	,052	,029	,170	,865
	LnDAU	-,003	,040	-,010	-,063	,950
	LnDAK	-,031	,041	-,118	-,746	,460

^a Dependent Variable: Abs_Res
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel: 4.6
Uji Regresi setelah Ln

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	11,664	2,930		3,981	,000
	LnPAD	,360	,080	,608	4,484	,000
	LnDAU	,039	,062	,079	,628	,533
	LnDAK	,150	,064	,301	2,356	,023

a. Dependent Variable: LnBM

Sumber: Output SPSS

Dari Tabel di atas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{LnBM} = 11,664 + 0,360 \text{ LnPAD} + 0,039 \text{ LnDAU} + 0,150 \text{ LnDAK} + e$$

Model regresi tersebut bermakna :

- Nilai konstanta sebesar 11,664 artinya apabila nilai variabel LnPAD, LnDAU dan LnDAK bernilai 0, maka anggaran belanja modal bernilai semakin bertambah.
- Variabel LnPAD menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan berpola positif sehingga semakin bertambah LnPAD maka semakin tinggi belanja modal. PAD berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0,360.
- Variabel LnDAU menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan berpola positif sehingga semakin bertambah LnDAU maka semakin tinggi belanja modal. DAU berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0,039.

- d. Variabel LnDAK menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan berpola positif sehingga semakin bertambah LnDAK maka semakin tinggi belanja modal. DAK berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0,150.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Hasil Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh LnPAD, LnDAU, dan LnDAK yang mempunyai F-hitung sebesar 8,806 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar $8,806 > F\text{-tabel}$ sebesar 2,81 yang artinya H_4 diterima maka dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Uji t

Hasil uji t adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Uji t untuk H_1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 4,484 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel LnPAD menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $4,484 > t\text{-tabel}$ sebesar 2,013 yang artinya bahwa H_1 diterima sehingga ada pengaruh yang signifikan PAD terhadap Belanja Modal.
- b. Hasil Uji t untuk H_2 diperoleh hasil t-hitung sebesar 0,628 dengan signifikansi sebesar 0,533. Nilai signifikan untuk variabel LnDAU menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $0,628 < t\text{-tabel}$ sebesar 2,013 yang artinya bahwa H_1 ditolak

sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan DAU terhadap Belanja Modal.

- c. Hasil Uji t untuk H_3 diperoleh hasil t-hitung sebesar 2,356 dengan signifikansi sebesar 0,023. Nilai signifikan untuk variabel LnDAK menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $2,356 >$ tabel sebesar 2,013 yang artinya bahwa H_1 diterima sehingga ada pengaruh DAK terhadap Belanja Modal.

Uji Koefisien Determinasi

Dapat diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,323. Hal ini berarti 32,3% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu LnPAD, LnDAU, dan LnDAK, sedangkan 67,7% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang pertama dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hal itu dikarenakan PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, PAD juga merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, sehingga apabila PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah itu akan meningkat. Dengan adanya hal tersebut, Pemerintah Daerah akan

memiliki inisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya guna menambah/melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah yang akan berdampak pada pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) yaitu PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan.

Pengaruh DAU terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang kedua dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak. Hal ini disebabkan karena nilai PAD daerah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta mengalami suatu peningkatan. Tujuan awal DAU adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah, maka DAU yang diperolehnya tinggi, dan sebaliknya jika potensi fiskalnya tinggi, maka DAU yang diperoleh daerah tersebut akan rendah. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta kuat, sehingga tidak tergantung DAU dari Pemerintah Pusat untuk membiayai alokasi belanja modal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) yaitu DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Pengaruh DAK terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang ketiga dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil tersebut menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan DAK besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar juga. Pada hasil ini memberikan adanya suatu indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah untuk membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Tujuan dari DAK yaitu untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. DAK memiliki peranan yang penting dalam hal pembangunan sarana dan prasarana dalam pelayanan di daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi

akuntabilitas dan tanggung jawab bagi penyediaan pelayanan untuk masyarakat. Pemanfaatan DAK digunakan pada kegiatan yang bertumpu pada investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik yang memiliki umur ekonomis yang panjang (lebih dari satu tahun), termasuk juga dalam hal pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat, begitu pula sebaliknya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011), yaitu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.

Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD, DAU dan DAK sebagai variabel independen dimana DAU, dan DAK termasuk didalam indikator Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama terhadap belanja modal adalah sebesar 32,3% berarti sisanya sebesar 67,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Yogyakarta.
2. Tidak terdapat pengaruh antara variabel DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Yogyakarta.
3. Terdapat pengaruh positif signifikan variabel DAK terhadap Belanja Modal.
4. Secara simultan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Melihat pengaruh PAD dan DAK terhadap belanja modal maka sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan anggaran PAD dan DAK yang di proporsikan ke anggaran belanja modal.

2. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DAU yang secara langsung tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an QS. Al-Anbiya (21):73. Fokus Media.

Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Faridi, Zahir Muhammad. 2011. *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan*. Pakistan Journal of Social Sciences Vol.31, No.1.

Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Kawedar, warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan*. Jurnal Investasi Vol. 9, No. 2.

- Nobianto, Riko dan Hanafiah Rafiudin. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.
- Nuarisa, Ardhian Sheila. 2013. *Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal Vol. 2, No.1 Universitas Negeri Semarang.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Supadmi Ni Luh. 2014. *Pengaruh PAD, DAU dan SiLPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi*. E-Jurnal akuntansi Universitas Udayana Vol.7, No.2.
- Sharma, Basudev. 2012. *Government Expenditure and Economic Growth in Nepal a Minute Analysis*. Journal of Business Management and Accounts Vol. 1(4) pp. 37-40.
- Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 2004, Jakarta: Lembaran Negara RI No. 125 Sekretaris Negara RI.*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 2004, Jakarta: Lembaran Negara RI No. 126 Sekretaris Negara RI.*
- Wirjosoegito, Soenobo. 2004. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia: Jakarta